



# *Indeks Pembangunan Manusia*

# 2007

## **Kabupaten Bintan**



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN BINTAN**



**INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA  
KABUPATEN BINTAN  
2007**

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN BINTAN**

## Kata Pengantar

Gerak pembangunan yang melaju cepat memasuki tahun-tahun pelaksanaan pembangunan dalam pemerintahan otonomi daerah menuntut tersedianya data dan informasi statistik dari berbagai bidang. Terkait dengan hakekat pembangunan nasional yaitu pembangunan manusia seutuhnya dimana menempatkan manusia tidak hanya sebagai objek (tujuan) tetapi juga sekaligus sebagai subjek (pelaku) pembangunan itu sendiri, sehingga model pembangunan yang diterapkan adalah pembangunan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Oleh karena itu, Keberadaan informasi statistik yang lengkap, akurat, tepat waktu dan relevan mengenai kualitas sumber daya manusia yang ada bagi Kabupaten Bintan dirasakan semakin penting.

Sewajarnya kita sambut gembira penerbitan buku “ **Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bintan 2007** ”. Diharapkan publikasi ini dapat memberikan gambaran mengenai kualitas pembangunan manusia di Kabupaten Bintan.

Akhirnya saya harapkan usaha pengumpulan dan penyajian data bagi penyusunan buku Indeks Pembangunan Manusia di masa mendatang perlu mendapat bantuan dan perhatian serius dari semua pihak sehingga dengan kesempurnaan dan kelengkapan datanya benar-benar menggambarkan wajah Kabupaten Bintan dan dapat diinformasikan secara luas kepada Masyarakat.

Tanjungpinang, Oktober 2008

## Daftar Isi

Kata Pengantar .....	ii
Daftar Isi .....	iii
Daftar Tabel .....	v
Daftar Gambar .....	vii
<b>Bab I</b>	
<b>Pendahuluan .....</b>	<b>1</b>
Latar Belakang .....	1
Tujuan Penulisan .....	3
Sistematika Penulisan .....	4
Sumber Data .....	5
<b>Bab II</b>	
<b>Studi Pustaka .....</b>	<b>6</b>
<b>Bab III</b>	
<b>Metodologi Penghitungan .....</b>	<b>9</b>
Pengertian .....	9
Indeks Pembangunan Manusia .....	10
<i>Umur Harapan Hidup</i> .....	10
<i>Tingkatan Pendidikan</i> .....	11
<i>Standar Hidup Layak</i> .....	12
<i>Paritas Daya Beli</i> .....	13
Penyusunan Indeks .....	16
<b>Bab IV</b>	
<b>Kondisi Sosial Ekonomi Penduduk Kabupaten Bintan .....</b>	<b>20</b>
Selayang Pandang Kabupaten Bintan .....	20
Pemantauan Upaya Pembangunan Manusia :	
Indikator Sosial Ekonomi .....	21
<i>Bidang Pendidikan</i> .....	21
<i>Bidang Kesehatan Masyarakat</i> .....	25
<i>Bidang Kesejahteraan Masyarakat</i> .....	28

<b>Bab V</b>	
<b>Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bintan .....</b>	<b>30</b>
Perkembangan IPM Kabupaten Bintan .....	30
Perkembangan IPM Antar Kabupaten/Kota .....	32
<b>Bab VI</b>	
<b>Indeks Pembangunan Manusia Antar Kecamatan di Kabupaten</b>	
<b>Bintan .....</b>	<b>36</b>
IPM Kecamatan .....	36
Perkembangan Komponen IPM Kecamatan .....	40
<i>Angka Harapan Hidup .....</i>	<i>40</i>
<i>Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah .....</i>	<i>42</i>
<i>Daya Beli .....</i>	<i>45</i>
<b>Bab VII</b>	
<b>Penutup .....</b>	<b>47</b>
<b>Daftar Pustaka</b>	

## Daftar Tabel

Tabel 1	Tahun Konversi dari Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan .....	12
Tabel 2	Komoditi Kebutuhan Pokok Sebagai Dasar Penghitungan Daya Beli (PPP) .....	14
Tabel 3	Nilai minimum dan Maksimum dari Setiap Komponen IPM .....	16
Tabel 4	Angka Partisipasi Sekolah di Kabupaten Bintan, 2006-2007 .....	23
Tabel 5	Persentase Penduduk 10 Tahun Keatas Menurut Ijazah yang dimiliki di Kabupaten Bintan, 2006-2007 .....	24
Tabel 6	Rasio Murid-Guru dan Murid-Sekolah di Kabupaten Bintan, Tahun Ajaran 2007/2008 .....	25
Tabel 7	Persentase Balita Menurut Penolong Kelahiran di Kabupaten Bintan, 2007 .....	26
Tabel 8	Persentase Penduduk Menurut Keluhan Kesehatan dan Cara Pengobatan di Kabupaten Bintan, 2007 .....	27
Tabel 9	Banyaknya Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Bintan, 2007 .....	28
Tabel 10	Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Per Bulan di Kabupaten Bintan, 2007 .....	29
Tabel 11	Perkembangan IPM Kabupaten Bintan, 2005-2007 .....	31
Tabel 12	Perkembangan Komponen IPM Kabupaten Bintan, 2005-2007 ..	32
Tabel 13	IPM Kabupaten/Kota se-Propinsi Kepulauan Riau, 2005-2006 .	35
Tabel 14	IPM dan Status Pembangunan Kecamatan, 2006-2007 .....	37
Tabel 15	IPM dan Urutannya Menurut Kecamatan, 2006-2007 .....	38

## Daftar Gambar

Gambar 1	IPM Versus PDRB Per Kapita .....	33
Gambar 2	Perkembangan IPM dan Reduksi <i>Shortfall</i> Menurut Kecamatan di Kabupaten Bintan, 2006-2007 .....	39
Gambar 3	Perkembangan Harapan Hidup Kecamatan, 2006-2007 .....	41
Gambar 4	Perkembangan Melek Huruf Kecamatan, 2006-2007 .....	43
Gambar 5	Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah Kecamatan, 2006-2007 .....	44
Gambar 6	Perkembangan Daya Beli Kecamatan, 2005-2006 (Ribu rupiah) .....	46

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

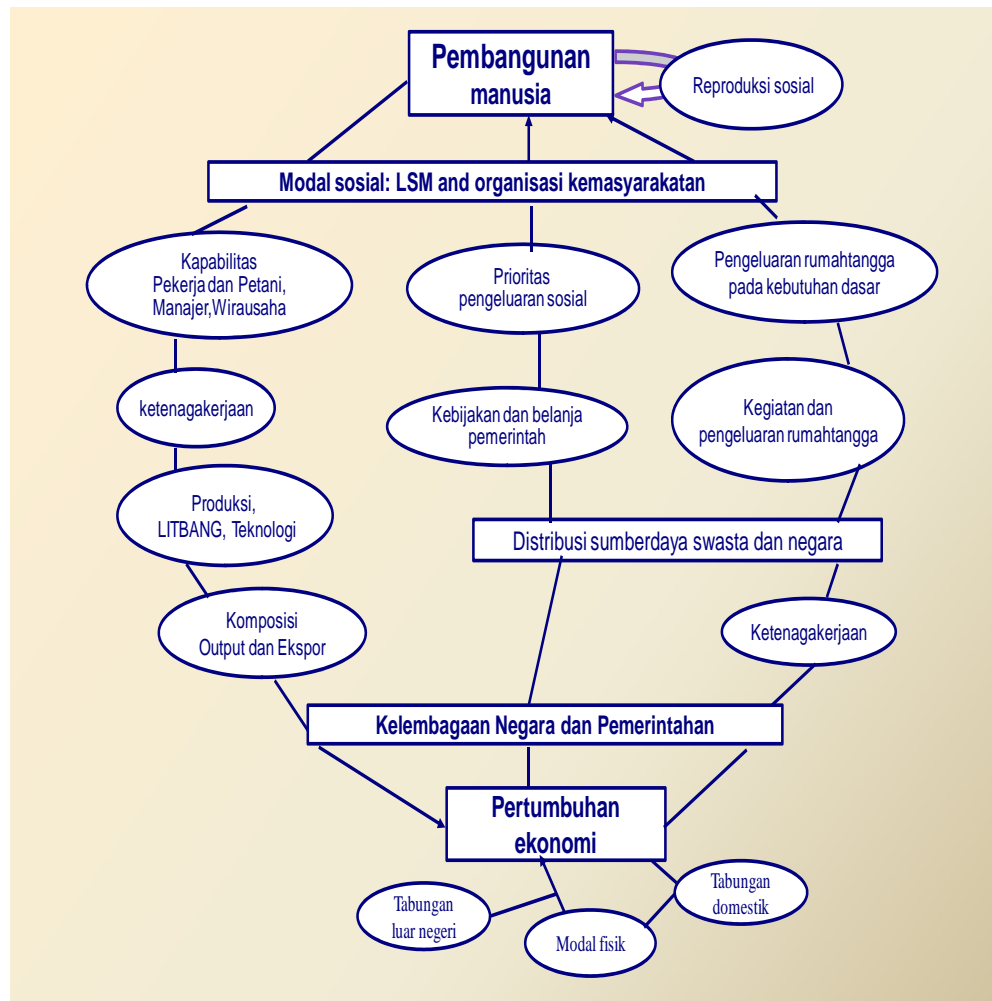
Secara parsial, keberhasilan kinerja pembangunan dapat dinilai seberapa besar persoalan yang paling mendasar dapat diatasi, seperti angka kemiskinan, pengangguran, buta huruf, ketahanan pangan, dan penegakan demokrasi. Namun persoalannya angka-angka parsial itu bisa bervariasi, beberapa aspek berhasil dan beberapa aspek lainnya gagal. Lantas bagaimana menilai secara keseluruhan?

Persoalan ini menjadi *concern* bagi para penyelenggara pemerintahan. Berbagai ukuran dapat digunakan namun barangkali tidak standar karena tidak bisa dibandingkan antar daerah atau negara. Maka, badan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), menetapkan suatu ukuran standar, yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index (HDI)*. Indeks ini dibentuk dari empat indikator, Angka Harapan Hidup ( $e^o$ ), Angka Melek Huruf (AMH), Rata-Rata Lama Sekolah (MYS) dan Kemampuan Daya Beli (DB). Indikator angka harapan hidup merepresentasikan dimensi umur panjang dan sehat. Selanjutnya, angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah mencerminkan output dari dimensi pengetahuan. Adapun indikator kemampuan daya beli digunakan untuk mengukur dimensi hidup layak.

Begitu luasnya cakupan dari pembangunan manusia, maka peningkatan IPM sebagai manifestasi dari pembangunan manusia dapat ditafsirkan sebagai keberhasilan dalam meningkatkan kemampuan dalam memperluas pilihan-pilihan (*enlarging the choices of the people*). Untuk meningkatkan IPM, tidak hanya semata tergantung pada pertumbuhan ekonomi. Sebab pertumbuhan ekonomi baru merupakan syarat perlu. Agar pertumbuhan ekonomi sejalan dengan pembangunan manusia, maka

pertumbuhan ekonomi harus disertai dengan syarat cukup, yaitu pemerataan pembangunan (lihat gambar berikut).

**Gambar 1**  
**Alur Hubungan Pembangunan Manusia dan Pertumbuhan Ekonomi**



Sumber: UNDP (1995)

Pemerataan pembangunan diperlukan untuk menjamin semua penduduk dapat menikmati hasil-hasil pembangunan. Diketahui, beberapa faktor penting dari hasil pembangunan yang sangat efektif bagi pembangunan manusia adalah pendidikan dan kesehatan. Dua faktor penting ini merupakan kebutuhan dasar bagi manusia yang perlu dimiliki agar mampu meningkatkan potensinya. Umumnya, semakin tinggi

kapabilitas dasar yang dimiliki suatu bangsa, semakin tinggi peluang untuk meningkatkan potensi bangsa itu. Ditengah eskalasi persaingan global, tuntutan terhadap kapabilitas dasar itu dirasakan semakin tinggi, jika tidak demikian maka bangsa itu akan kalah bersaing dengan bangsa-bangsa lainnya yang lebih maju.

Berdasarkan pengalaman pembangunan di berbagai negara, diperoleh pembelajaran bahwa untuk mempercepat pembangunan manusia, antara lain dapat dilakukan melalui dua hal, yaitu distribusi pendapatan yang merata dan alokasi belanja publik yang memadai untuk pendidikan dan kesehatan. Korea Selatan sebagai contoh yang sukses, tetap konsisten melakukan dua hal tersebut. Sebaliknya Brazil mengalami kegagalan, karena memiliki distribusi pendapatan yang timpang dan alokasi belanja publik yang kurang memadai untuk pendidikan dan kesehatan (UNDP, BPS, Bappenas, 2004).

Pemerintah saat ini tampaknya sangat *concern* dengan pembangunan manusia. Hal ini ditandai dengan diikutkannya IPM sebagai salah satu alokator Dana Alokasi Umum (DAU) untuk mengatasi kesenjangan keuangan daerah (*fiscal gap*). Seyogianya, daerah dengan IPM rendah secara perlahan dapat mengejar ketertinggalannya, karena memperoleh alokasi dana yang berlebih. Meski demikian, hal itu masih sangat tergantung dengan strategi pembangunan yang dijalankan.

Dengan demikian, cukup menarik melihat pencapaian pembangunan manusia yang telah dilakukan selama ini, khususnya selama tiga tahun terakhir. Selain itu, menarik pula untuk dilihat perkembangan masing-masing komponen dalam memberikan kontribusi terhadap peningkatan IPM. Terkait dengan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan termasuk kinerja pemerintah barangkali perlu dilihat hasil-hasil pemerataan pembangunan manusia antar wilayah, khususnya pada level kecamatan.

## **1.2 Tujuan Penulisan**

Secara umum, publikasi ini akan menyajikan data dan analisa IPM selama 2006-2007. Untuk melihat perkembangan IPM, juga digunakan IPM tahun sebelumnya khususnya pada dua tahun terakhir berikut posisi relatif antar kecamatan. Secara khusus, publikasi ini bertujuan menyajikan perkembangan IPM per kecamatan dan komponennya. Selain itu juga akan disinggung posisi relatif kemajuan pembangunan kualitas hidup manusia Kabupaten Bintan terhadap kabupaten/kota lainnya di Provinsi Kepulauan Riau.

## **1.3 Sistematika Penulisan**

Publikasi "**Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bintan Tahun 2007**" ini terdiri atas lima bab sebagai berikut.

### **Bab I Pendahuluan**

Menguraikan tentang latar belakang, tujuan dan sistematika penulisan serta sumber data yang digunakan. Bab ini menjelaskan pentingnya IPM sebagai ukuran untuk melihat kemajuan pembangunan manusia khususnya di setiap kecamatan di Kabupaten Bintan

### **Bab II Studi Pustaka**

Menerangkan tentang studi pustaka yang merupakan temuan tentang keberhasilan dan kegagalan pembangunan manusia.

### **Bab III Metodologi Penghitungan**

Menguraikan tentang pengetahuan dan metode penghitungan indeks setiap komponen hingga terbentuknya IPM serta konsep dan definisi.

## **Bab IV Kondisi Sosial Ekonomi Penduduk Kabupaten Bintan**

Membahas nilai dan status IPM yang merupakan kinerja pembangunan manusia di Kabupaten Bintan serta perbandingannya antar kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau.

## **Bab V Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bintan**

Menjelaskan selang pandang Kabupaten Bintan dan menyoroti indikator sosial ekonomi masyarakat sebagai pemantau upaya pembangunan manusia di Kabupaten Bintan.

## **Bab VI Indeks Pembangunan Manusia Antar Kecamatan di Kabupaten Bintan**

Mengukur kinerja pembangunan manusia antar kecamatan di Kabupaten Bintan dan menguraikan disparitas antar kecamatan.

## **Bab VII Penutup**

Menguraikan kesimpulan dari hasil analisis dan penghitungan “Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bintan Tahun 2007”, serta beberapa saran yang dapat menjadi masukan untuk Pemerintah Kabupaten Bintan.

### **1.4 Sumber Data**

Sumber data utama yang digunakan untuk penghitungan IPM adalah data Susenas Kor, Susenas Modul dan Susenas Panel, serta Indeks Harga Konsumen (IHK). Data Susenas Kor digunakan untuk menghitung tiga indikator pembentuk IPM. Ketiga indikator tersebut masing-masing adalah angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah dan daya beli.

## **BAB II**

### **STUDI PUSTAKA**

*United Nasional Development Program (UNDP)* dalam Laporan Pembangunan Indonesia 1996 menyatakan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, mempengaruhi satu dengan lainnya. Pada satu sisi pertumbuhan ekonomi mempengaruhi pembangunan manusia melalui kegiatan rumah tangga (membesarkan anak), pengeluaran rumahtangga untuk kebutuhan-kebutuhan dasar (seperti makanan, obat-obatan, buku sekolah, dan sebagainya), dan kebijaksanaan dan pengeluaran pemerintah (prioritas pengeluaran untuk bidang sosial). Pada sisi lain pembangunan manusia mempengaruhi pertumbuhan ekonomi melalui kapabilitas pekerja, petani, kewirausahaan, dan manajerial.

Badan Pusat Statistik (BPS) melalui publikasi Indeks Pembangunan Manusia 2004-2005 menekankan bahwa untuk mempercepat pembangunan manusia diperlukan pertumbuhan ekonomi, namun tidak cukup mengingat pertumbuhan ekonomi merupakan syarat perlu belum memadai sehingga perlu syarat tambahan. Syarat tambahan yang dimaksud adalah distribusi pendapatan merata dan alokasi belanja publik yang memadai untuk menjamin penduduk akan menikmati hasil-hasil pembangunan. Meskipun syarat-syarat untuk mempercepat pembangunan manusia itu sudah dipenuhi, namun berdasarkan pengalaman pembangunan di berbagai negara tidak selalu menunjukkan keberhasilan.

Dalam literatur-literatur konvensional yang menyoroti keterkaitan antara pembangunan manusia, demokrasi, dan pertumbuhan ekonomi menemukan perbedaan keberhasilan di setiap negara yang diamati. Salah satu hipotesa yang terkait dengan tuntutan demokrasi akan meningkat seiring dengan peningkatan pendapatan per kapita adalah hipotesa '*cruel choice*' yang merupakan pilihan dilematis antara

demokrasi dan disiplin, karena demokrasi pada tahap awal pembangunan tidak sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang cepat sehingga dibutuhkan disiplin. Teori konvensional lainnya adalah hipotesa '*trickle down*' (tetesan kebawah) yang berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi yang cepat akan memberikan sumbangan pada pembangunan manusia. Berdasarkan kedua hipotesa tersebut bahwa hubungan antara pembangunan manusia, demokrasi dan pertumbuhan ekonomi merupakan garis linear satu arah dimana pertumbuhan ekonomi menjadi penggerak. Namun demikian, bukti-bukti mengenai hipotesa "*cruel choice*" dan "*trickle down*" tidak terlalu meyakinkan. Negara seperti Sri Lanka, Costa Rica, serta Trinidad dan Tobago telah mencapai pembangunan manusia yang lebih dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang jauh lebih rendah. Sedangkan Indonesia memiliki peringkat IPM 109 yang lebih tinggi daripada peringkat PDB 113. Pendapatan Indonesia kurang dari setengah pendapatan per kapita Botswana, tetapi peringkat IPM Indonesia 12 tingkat lebih tinggi.

Model pertumbuhan *endogenous* (dari dalam) memberikan kerangka alternatif untuk mempelajari hubungan pembangunan manusia, demokrasi dan pertumbuhan ekonomi. Teori ini menyatakan bahwa perbaikan tingkat kematian bayi dan pencapaian pendidikan dasar akan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Studi lintas negara yang dilakukan Barro dalam laporan pembangunan manusia 2001 menemukan adanya hubungan sebab akibat dari kematian bayi dan pendidikan dengan pertumbuhan ekonomi yang juga mengikuti teori modal manusia atau "*human capital theory*".

Dalam laporan pembangunan manusia, Indonesia mengajukan argumen memungkinkan berinteraksinya ketiga variabel pembangunan manusia, demokrasi dan pertumbuhan ekonomi. Satu variabel dengan variabel lainnya (dari tiga variabel) saling melengkapi yang menghasilkan segitiga kebaikan (*virtuous triangle*). Pembangunan manusia secara positif berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi baik langsung

maupun tidak langsung melalui demokrasi. Efek langsung pembangunan manusia terhadap pertumbuhan ekonomi mengikuti teori modal manusia dan pertumbuhan *engogenous* yang banyak dikemukakan dalam berbagai literatur empiris. Efek tidak langsung pembangunan manusia terhadap pertumbuhan ekonomi melalui konsolidasi demokrasi. Sebagai contoh angka melek huruf tinggi, kesehatan yang baik dan kesetaraan kesempatan memungkinkan masyarakat berpartisipasi dalam proses politik dan membantu membangun konsensus nasional.

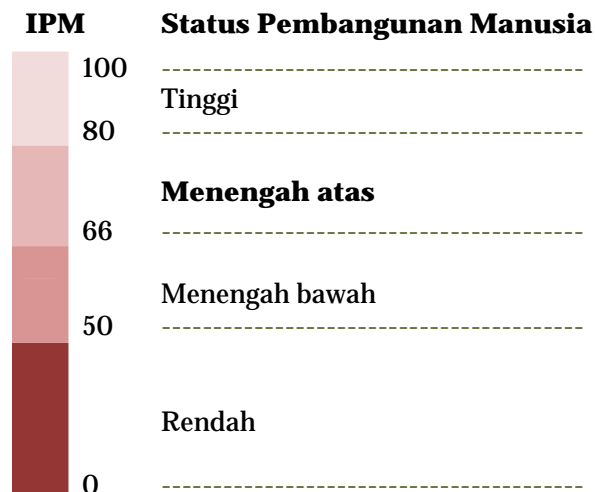
## **BAB III**

### **METODOLOGI PENGHITUNGAN**

#### **3.1 Pengertian**

Indeks Pembangunan Manusia (IPM), secara khusus mengukur capaian pembangunan manusia menggunakan beberapa komponen dasar kualitas hidup. IPM dihitung berdasarkan data yang dapat menggambarkan ke empat komponen: yaitu capaian umur panjang dan sehat yang mewakili bidang kesehatan; angka melek huruf, partisipasi sekolah dan rata-rata lamanya bersekolah mengukur kinerja pembangunan bidang pendidikan; dan kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan.

Dengan menggunakan IPM, UNDP membagi tingkatan status pembangunan manusia suatu negara atau wilayah ke dalam tiga golongan, yaitu rendah (kurang dari 50), sedang atau menengah (antara 50 dan 80), dan tinggi (80 ke atas). Untuk keperluan perbandingan antar kabupaten/kota tingkatan status menengah dipecah menjadi dua, yaitu menengah bawah dan menengah atas, dengan kriteria sebagai berikut:



### **3.2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan dan kehidupan yang layak.

Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor didalamnya. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan indikator angka harapan hidup. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah yang dikombinasikan. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli (*Purchasing Power Parity*).

#### **3.2.1 Angka Harapan Hidup**

Angka harapan hidup dapat dihitung dengan menggunakan pendekatan tidak langsung (*indirect estimation*). Ada dua jenis data masukan yang digunakan untuk menghitung angka umur harapan hidup; yaitu Anak Lahir Hidup (ALH) dan Anak Masih Hidup (AMH). Paket program *Mortpack* digunakan untuk menghitung angka harapan hidup dengan input data ALH dan AMH. Selanjutnya menggunakan program *Mortpack* ini, dipilih metode metode *Trussel* dengan model *West*, yang sesuai dengan dengan histori kependudukan dan kondisi Indonesia dan Negara-negara Asia Tenggara umumnya (Preston, 2004).

Besarnya nilai maksimum dan nilai minimum untuk masing-masing komponen ini merupakan nilai besaran yang telah disepakati oleh semua negara (175 negara didunia). Pada komponen angka umur harapan hidup, angka tertinggi sebagai batas atas untuk penghitungan indeks dipakai 85 tahun dan terendah adalah 25 tahun.

Angka ini merupakan angka rata-rata umur terpanjang penduduk Swedia dan terpendek dari negara Siera Leon di Afrika.

### **3.2.2 Tingkat Pendidikan**

Untuk mengukur dimensi pengetahuan penduduk digunakan dua indikator, yaitu rata-rata lama sekolah (*means years schooling*) dan angka melek huruf. Selanjutnya rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Sedangkan angka melek huruf adalah persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin dan atau huruf lainnya. Proses penghitungannya, kedua indikator tersebut digabung setelah masing-masing diberikan bobot. Rata-rata lama sekolah diberi bobot sepertiga dan angka melek huruf diberi bobot dua pertiga.

Untuk penghitungan indeks pendidikan, dua batasan dipakai sesuai kesepakatan beberapa negara saat pertama kali penghitungan IPM dilakukan. Batas atas untuk angka melek huruf, dipakai maksimum 100 dan minimum 0 (nol), yang menggambarkan kondisi 100 persen atau semua masyarakat mampu membaca dan menulis, dan nilai nol mencerminkan kondisi sebaliknya.

Rata-rata lama sekolah dihitung dari variabel pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan tingkat pendidikan yang sedang diduduki, yang ditanyakan pada kuesioner Susenas. Tabel 1 menyajikan faktor konversi dari tiap-tiap jenjang pendidikan yang ditamatkan. Untuk yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan, lama sekolah (YS) dihitung berdasarkan formula di bawah:

$$\mathbf{YS = Tahun konversi + kelas tertinggi yang pernah diduduki - 1}$$

Contohnya, seseorang yang bersekolah sampai kelas 2 SMU :  $YS = 9 + 2 - 1 = 10$  (tahun)

**Tabel 1**  
**Tahun Konversi dari Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan**

<b>Pendidikan tertinggi yang ditamatkan</b>	<b>Tahun konversi</b>
1. Tdk pernah sekolah	0
2. Sekolah dasar	6
3. SLTP	9
4. SLTA/SMU	12
5. Diploma 1	13
6. Diploma 2	14
7. Akademi/Diploma III	15
8. Diploma 4/Sarjana	16
9. Magister (S2)	18
10. Doktor (S3)	21

### **3.2.3 Standar Hidup Layak**

Selanjutnya dimensi ketiga dari ukuran kualitas hidup manusia adalah standar hidup layak. Dalam cakupan lebih luas standar hidup layak menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi. Standar hidup, dalam laporan ini, didekati dari pengeluaran riil per kapita yang telah disesuaikan. Untuk menjamin keterbandingan antar daerah dan antar waktu, dilakukan penyesuaian sebagai berikut:

1. Menghitung pengeluaran per kapita dari data modul Susenas [=Y];
2. Menaikan nilai Y sebesar 20,00 persen [=Y1], karena dari berbagai studi diperkirakan bahwa data dari Susenas cenderung lebih rendah sekitar 20,00 persen.
3. Menghitung nilai riil Y1 dengan mendeflasi Y1 dengan indeks harga konsumen (CPI) [=Y2];

4. Menghitung nilai daya beli –Purchasing Power Parity (PPP)- untuk tiap daerah yang merupakan harga suatu kelompok barang, relatif terhadap harga kelompok barang yang sama di daerah yang ditetapkan sebagai standar, yaitu Jakarta Selatan;
5. Membagi Y2 dengan PPP untuk memperoleh nilai Rupiah yang sudah disetarakan antar daerah [=Y3];
6. Mengurangi nilai Y3 dengan menggunakan formula Atkinson untuk mendapatkan estimasi daya beli [=Y4]. Langkah ini ditempuh berdasarkan prinsip penurunan manfaat marginal dari pendapatan.

#### **3.2.4 Paritas Daya Beli**

Paritas daya beli –*Purchasing Power Parity* (PPP)- dihitung dengan metode yang juga digunakan oleh *International Comparison Project* dalam menstandarisasi PDB untuk perbandingan antar negara. Penghitungan didasarkan pada harga 27 komoditas yang ditanyakan pada modul konsumsi Susenas. Harga di Jakarta Selatan digunakan sebagai standar harga. Formula penghitungan PPP adalah sebagai berikut:

$$PPP = \frac{\sum_j E_{(i,j)}}{\sum_j P_{(i,j)} Q_{(i,j)}}$$

Dimana:

$E_{(ij)}$ : pengeluaran untuk komoditi  $j$  di provinsi  $i$

$P_{(9,j)}$  : harga komoditi  $j$  di Jakarta Selatan

$Q_{(i,j)}$  : volume komoditi  $j$  (unit) yang dikonsumsi di provinsi

Tabel 2  
**Komoditi Kebutuhan Pokok Sebagai Dasar Penghitungan  
 Daya Beli (PPP)**

<b>Komoditi</b>	<b>Unit</b>	<b>Proporsi dari total konsumsi</b>
1. Beras lokal	Kg	7,25
2. Tepung terigu	Kg	0,10
3. Singkong	Kg	0,22
4. Tuna/cakalang	Kg	0,50
5. Teri	Ons	0,32
6. Daging sapi	Kg	0,78
7. Ayam	Kg	0,65
8. Telur	Butir	1,48
9. Susu kental manis	397 gram	0,48
10. Bayam	Kg	0,30
11. Kacang panjang	Kg	0,32
12. Kacang tanah	Kg	0,22
13. Tempe	Kg	0,79
14. Jeruk	Kg	0,39
15. Pepaya	Kg	0,18
16. Kelapa	Butir	0,56
17. Gula	Ons	1,61
18. Kopi	Ons	0,60
19. Garam	Ons	1,15
20. Merica	Ons	0,13
21. Mie instans	80 gram	0,79
22. Rokok kretek	10 btng	2,86
23. Listrik	Kwh	2,06
24. Air minum	M3	0,46
25. Bensin	Liter	1,02
26. Minyak tanah	Liter	1,74
27. Sewa rumah	Unit	11,56
<b>Total</b>		<b>37,52</b>

Unit Kuantitas sewa rumah ditentukan berdasarkan Indeks Kualitas Rumah yang dibentuk dari tujuh komponen kualitas rumah yang diperoleh dari modul Susenas.

Nilai dari masing-masing komponen adalah:

1. Lantai: keramik, marmer atau granit = 1, lainnya = 0,
2. Luas lantai per orang<sup>3</sup> 10 m<sup>2</sup> = 1, lainnya=0,
3. Dinding: tembok = 1, lainnya = 0,
4. Atap: kayu/sirap, beton = 1, lainnya = 0,
5. Fasilitas penerangan: listrik = 1, lainnya = 0
6. Fasilitas air minum: ledeng = 1, lainnya = 0,
7. Jamban: milik sendiri = 1, lainnya = 0,
8. Skor awal untuk setiap rumah = 1.

Indeks kualitas rumah merupakan penjumlahan dari skor yang dimiliki oleh suatu rumah tinggal dan bernilai sampai dengan 8. Kuantitas dari rumah yang dikonsumsi oleh suatu rumah tangga adalah Indeks Kualitas Rumah=6, maka kuantitas rumah yang dikonsumsi oleh rumah tangga tersebut adalah 6/8 atau 0,75 unit. UNDP mengukur standar hidup layak menggunakan GDP riil yang disesuaikan, sedangkan BPS dalam menghitung standar hidup layak menggunakan rata-rata pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan dengan formula Atkinson.

$$\begin{aligned}
 C(I) &= C_{(i)} && \text{Jika } C_{(i)} < Z \\
 &= Z + 2(C_{(i)} - Z)^{1/2} && \text{Jika } Z < C_{(i)} < 2Z \\
 &= Z + 2(Z)^{1/2} + 3(C_{(i)} - 2Z)^{1/3} && \text{Jika } 2Z < C_{(i)} < 3Z
 \end{aligned}$$

Dimana:

$C_{(i)}$  = PPP dari nilai riil pengeluaran per kapita

Z = Batas tingkat pengeluaran yang ditetapkan secara arbiter sebesar Rp.549.500 per kapita per tahun atau Rp. 1.500 per kapita per *hari*

### 3.3 Penyusunan Indeks

Sebelum penghitungan IPM, setiap komponen harus dihitung indeksnya. Formula yang digunakan sebagai berikut;

$$\text{indeks } X_{(i,j)} = \frac{(X_{(i,j)} - X_{(i-\min)})}{(X_{(i-\max)} - X_{(i-\min)})}$$

Dimana:

$X_{(i,j)}$  = Indeks komponen ke-i dari daerah j

$X_{(i-\min)}$  = Nilai minimum dari  $X_i$

$X_{(i-\max)}$  = Nilai maksimum dari  $X_i$

Untuk menghitung indeks rangkuman batas minimum dan maksimum setiap komponen IPM sebagai berikut:

Tabel 3

#### Nilai Maksimum dan Minimum dari Setiap Komponen IPM

Komponen IPM	Nilai Maksimum	Nilai Minimum	Keterangan
1. Angka Harapan Hidup	85	25	Standar UNDP
2. Angka Melek Huruf	100	0	Standar UNDP
3. Rata-rata lama sekolah	15	0	
4. Daya beli	732,720 <sup>a</sup>	300,000 (1996)	UNDP menggunakan PDB Riil disesuaikan
		360,000 <sup>b</sup> (1999,2002)	

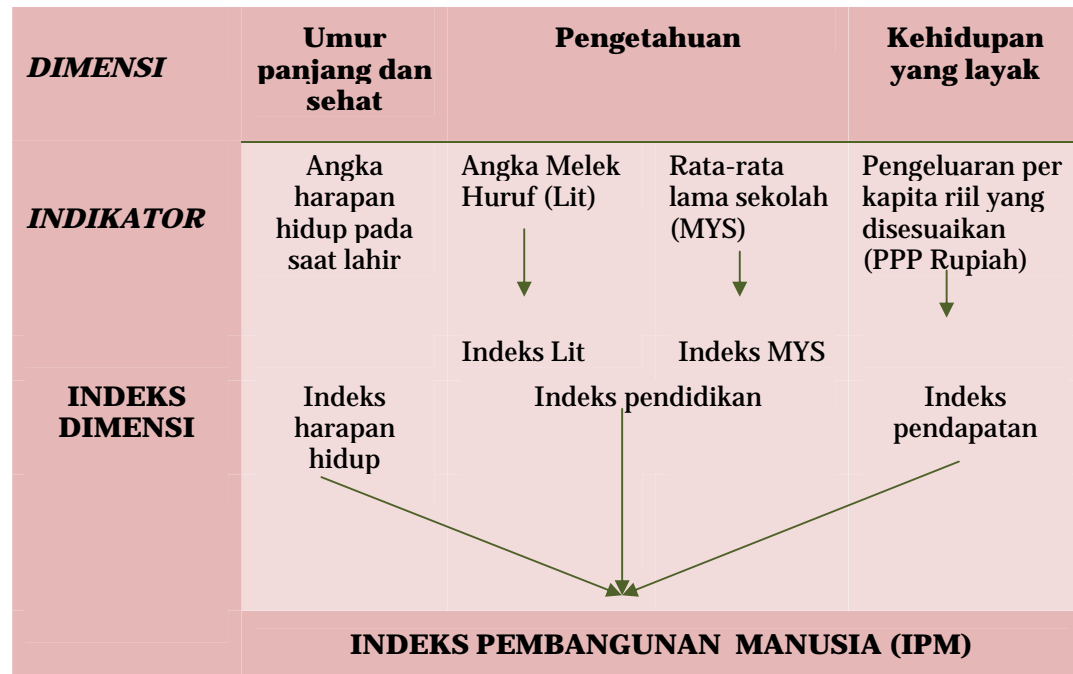
Keterangan : <sup>a)</sup> Perkiraan maksimum pada akhir PJP II tahun 2018

<sup>b)</sup> Penyesuaian garis kemiskinan lama dengan garis kemiskinan baru

Penghitungan indeks daya beli atau tingkat kehidupan yang layak, seperti terlihat pada Tabel 3 dan diagram penghitungan IPM, terlihat bahwa batas atas penghitungan

digunakan batas maksimum dan minimum adalah sebesar Rp 732,720,- dan Rp 300,000,- ini merupakan batas sampai dengan tahun 1996. Pada tahun 2002, batas bawah penghitungan PPP dirubah dan disepakati menjadi Rp 360,000,- mengikuti kondisi pasca krisis ekonomi.

**Diagram Penghitungan IPM**



Dari diagram diatas terlihat bahwa untuk menghitung IPM, terlebih dahulu dihitung untuk masing-masing indeks harapan hidup, indeks pendidikan dan indeks pendapatan. Penghitungan masing-masing Indeks dilakukan seperti dalam penjelasan dan rumusan yang telah diuraikan.

### 3.4 Reduksi Shortfall

Perbedaan laju perubahan IPM selama periode waktu tertentu dapat diukur dengan rata-rata reduksi shortfall per tahun. Nilai shortfall mengukur keberhasilan

dipandang dari segi jarak antara apa yang telah dicapai dengan apa yang harus dicapai, yaitu jarak dengan nilai maksimum. Kondisi ideal yang dapat dicapai adalah IPM sama dengan 100. Nilai reduksi shortfall yang lebih besar menandakan peningkatan IPM yang lebih cepat. Pengukuran ini didasarkan pada asumsi bahwa laju perubahan tidak bersifat linier, tetapi laju perubahan cenderung melambat pada tingkat IPM yang lebih tinggi. Formula penghitungan reduksi shortfall adalah:

$$R = \left[ \frac{IPM_{(1+n)} - IPM_{(t)}}{IPM_{(ideal)} - IPM_{(t)}} \right]^{1/n} \times 100$$

Dimana:

$IPM_{(t)}$  adalah IPM tahun ke  $t$

$IPM_{(ideal)}$  adalah 100

$n$  = tahun

Nilai reduksi shortfall juga dapat dihitung untuk masing-masing komponen IPM.

### **3.5 Komponen IPM dan Konsep**

#### **Angka harapan hidup pada waktu lahir ( $e^0$ )**

Perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur.

#### **Angka melek huruf penduduk dewasa**

Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin atau huruf lainnya.

### **Rata-rata lama sekolah**

Rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani.

### **Indeks Pendidikan**

Indeks ini didasarkan pada kombinasi angka melek huruf di kalangan penduduk dewasa dan rata-rata lama sekolah. Nilai indeks tersebut berkisar antara 0-100. Cara penghitungan tersaji di atas

### **Paritas daya beli (Purchasing power parity PPP)**

PPP memungkinkan dilakukannya perbandingan harga-harga riil antar provinsi dan antar kabupaten, mengingat nilai tukar yang biasa digunakan dapat menurunkan atau menaikkan nilai daya beli yang terukur dari konsumsi perkapita yang telah disesuaikan. Dalam konteks PPP untuk Indonesia, satu rupiah di suatu provinsi memiliki daya beli yang sama dengan satu rupiah di Jakarta. PPP dihitung berdasarkan pengeluaran riil per kapita setelah disesuaikan dengan indeks harga konsumen dan penurunan utilitas marginan yang dihitung dengan rumus Atkinson.

### **Indeks Daya Beli**

Salah satu dari tiga komponen indeks pembangunan manusia yang didasarkan pada paritas daya beli (PPP) disesuaikan dengan rumus Atkinson. Nilai indeks ini berkisar antara 0-100. Detail penghitungan indeks ini disajikan di catatan teknis.

### **Reduksi Shortfall**

Mengukur keberhasilan dipandang dari jarak antara yang dicapai terhadap kondisi ideal (IPM = 100). Nilai reduksi shortfall yang lebih besar menandakan peningkatan IPM yang lebih cepat. Pengukuran ini didasarkan asumsi, laju perubahan tidak bersifat linier, tetapi laju perubahan cenderung melambat pada tingkat IPM yang lebih tinggi.

## **BAB IV**

# **KONDISI SOSIAL EKONOMI PENDUDUK KABUPATEN BINTAN**

### **4.1 Selayang Pandang Kabupaten Bintan**

Kabupaten Bintan merupakan kabupaten induk dari Provinsi Kepulauan Riau yang dahulu bernama Kabupaten Kepulauan Riau. Berdasarkan UU No.53 Tahun 1999 Kabupaten Kepulauan Riau dimekarkan menjadi Kabupaten Natuna dan Karimun. Kemudian pada tahun 2001 Kota Administratif Tanjungpinang dirubah statusnya menjadi kota Tanjungpinang dengan UU No.5 Tahun 2001. Pada tahun 2003 Kabupaten Kepulauan Riau kembali dimekarkan dengan Kabupaten Lingga berdasarkan UU No.31 Tahun 2003. Dan sejak tahun 2005 nama Kabupaten Kepulauan Riau dirubah menjadi Kabupaten Bintan dengan dikeluarkannya PP No.5 Tahun 2006. Kabupaten ini beribu kota di Bandar Sri Bayintan - Bintan Buyu. Dari hasil Sensus Penduduk 2000, Kabupaten Bintan dihuni sekitar 105.774 penduduk dimana mayoritas sukunya adalah Melayu dan Jawa, disamping suku Banjar, namun persentasenya relatif kecil. Agama terbesar di Kepulauan Riau adalah agama Islam (86,47 persen), di samping Buddha (7,34 persen) dan Kristen Protentan (3,74 persen). Pada tahun 2006 jumlah penduduk Kabupaten Bintan yaitu 171.303 jiwa.

Kabupaten Bintan berbatasan langsung dengan negara Singapura dan Malaysia. Secara administratif Kabupaten Bintan terbagi atas 6 (enam) kecamatan dengan 42 desa/kelurahan. Sejak tanggal 1 Juli 2004, Kabupaten Bintan (*dulu* Kabupaten Kepulauan Riau) memisahkan diri dari provinsi induk (Provinsi Riau) dan bersama-sama dengan Kabupaten Natuna, Kabupaten Karimun, Kota Batam, Kota Tanjungpinang, serta Kabupaten Lingga telah membentuk provinsi baru, yaitu Provinsi Kepulauan Riau dengan pusat pemerintahan di Kota Tanjungpinang.

Wilayah Kabupaten Bintan mayoritas adalah lautan. Luas keseluruhan mencapai 87.717,84 Km<sup>2</sup>, dengan luas daratan 1.319,51 Km<sup>2</sup> dan lautan 86.398,33 Km<sup>2</sup>. Daerah ini terdiri dari sejumlah pulau baik besar maupun kecil yang mencapai 240 pulau yang menyebar antara 0°6'17" Lintang Utara – 1°34'52" Lintang Utara dan 104°12'47" Bujur Timur – 108°2'27" Bujur Timur.

## **4.2 Pemantauan Upaya Pembangunan Manusia : Indikator Sosial Ekonomi**

Sebagaimana paradigma pembangunan yang menempatkan manusia sebagai titik sentral dari pembangunan itu sendiri, maka upaya-upaya peningkatan kualitas manusia baik secara fisiologis, ekonomis maupun spiritual perlu diupayakan. Dalam menggambarkan upaya-upaya pembangunan manusia biasanya digunakan indikator-indikator sosial maupun ekonomi yang meliputi bidang pendidikan, kesehatan masyarakat, ketenagakerjaan, kesejahteraan masyarakat maupun pertumbuhan ekonomi.

### **4.2.1 Bidang Pendidikan**

Pendidikan pada hakekatnya adalah usaha sadar manusia untuk mengembangkan kepribadian di dalam maupun di luar sekolah dan berlangsung seumur hidup. Oleh karenanya agar pendidikan dapat dimiliki oleh seluruh rakyat sesuai dengan kemampuan masing-masing individu, maka pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah.

Pemerintah sampai saat ini dan juga di masa-masa mendatang akan terus berusaha meningkatkan pendidikan bangsanya agar cita-cita kemerdekaan dapat menjadi kenyataan. Dalam pelaksanaannya tercermin dalam pasal 31 ayat 1 Undang-

Undang Dasar 1945 yang menyatakan, “*Tiap-tiap Warganegara berhak mendapat pengajaran.*”

Pemerintah sadar, bahwa untuk mendapatkan pendidikan yang memadai harus ditunjang dengan kemampuan masyarakat. Rendahnya pendapatan keluarga selalu menjadi kendala untuk tidak menyekolahkan anaknya. Realita ini senantiasa ditemui di sekeliling kita. Banyak anak yang mestinya belajar, namun sudah harus bekerja untuk membantu menambah penghasilan keluarga. Kondisi ini mendorong pemerintah membuat kebijaksanaan wajib belajar Sekolah Dasar 6 tahun yang kemudian disusul dengan wajib belajar pendidikan sembilan tahun. Kebijakan lain adalah melalui program sekolah terbuka.

Program atau kebijakan pemerintah dewasa ini dalam bidang pendidikan pada hakekatnya adalah bertujuan untuk menampung jumlah murid sebanyak-banyaknya. Penekanan program adalah pada aspek kuantitas. Hal ini sangat dimaklumi karena pemerintah ingin agar penduduk Kepulauan Riau khususnya dan penduduk Indonesia pada umumnya terbebas dari masalah buta huruf, buta bahasa Indonesia dan pemerataan kesempatan pendidikan dasar.

Selain itu aspek kualitas juga harus mendapat perhatian. Hal ini dalam rangka menyongsong abad globalisasi, dimana berbagai pengaruh dari luar masuk dengan bebas ke negeri ini. Dengan demikian kualitas sumber daya manusia harus dimiliki untuk siap bersaing dengan pihak luar.

Kemampuan baca tulis adalah kemampuan dasar untuk meningkatkan kualitas manusia, sehingga diharapkan dengan meningkatnya kemampuan baca tulis maka akan meningkat akses terhadap berbagai informasi yang pada akhirnya pengetahuannya pun akan ikut meningkat. Kemampuan baca tulis tercermin dari angka melek huruf, dalam hal ini merupakan persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang dapat membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya. Jika dilihat

dari indikator melek huruf, terlihat bahwa penduduk Kabupaten Bintan yang bisa membaca dan menulis meningkat dari 89,3 persen pada tahun 1996 menjadi 94,4 persen pada tahun 2007. Pada tahun 2002 terjadi penurunan angka melek huruf. Hal ini dapat dimaklumi karena imbas dari pemisahan Kota Tanjungpinang.

Dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pencapaian program belajar 9 tahun, penduduk usia sekolah seyogyanya dapat mengakses fasilitas pendidikan yang ada. Untuk melihat tingkat pemanfaatan atau jangkauan fasilitas pendidikan dapat digunakan indikator Angka Partisipasi Sekolah (APS). APS memberikan gambaran secara umum tentang banyaknya anak sekolah umur tertentu yang sedang bersekolah, tanpa memperhatikan jenjang pendidikan yang sedang diikuti.

**Tabel 4**  
**Angka Partisipasi Sekolah di Kabupaten Bintan,**  
**2006-2007**

<b>Kelompok Umur</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>
7 – 12	99,45	98,44
13 – 15	83,33	91,35
16 – 18	59,25	72,16

Sumber : BPS Kabupaten Bintan

Angka partisipasi sekolah anak-anak usia 7 – 12 tahun pada tahun 2007 sudah hampir mencapai 100 persen, yaitu sebesar 98,44. Tingkat partisipasi sekolah menunjukkan trend penurunan seiring dengan kenaikan usia, hal ini dikarenakan biasanya anak-anak tidak melanjutkan ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi.

Penduduk Kabupaten Bintan pada tahun 2007 menurut tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan masih perlu mendapat perhatian ekstra, mengingat penduduk yang belum mempunyai ijazah SD, baik yang tidak/belum pernah SD maupun tidak tamat SD masih cukup tinggi yaitu 26,98 persen pada tahun 2007. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, tingkat pendidikan di Kabupaten Bintan

belum menunjukkan peningkatan yang berarti, dimana jumlah penduduk yang berijazah sarjana naik sekitar 1,02 persen.

Tabel 5  
**Persentase Penduduk 10 Tahun Keatas Menurut Ijazah yang dimiliki di Kabupaten Bintan, 2006-2007**

<b>Indikator</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>
<b>Ijazah tertinggi</b>		
Tdk/blm pernah sekolah	7,36	5,28
Tdk/blm tamat SD/MI	21,18	21,70
SD/MI/ sederajat	25,98	25,62
SLTP/MTs/ sederajat	14,98	19,48
SLTA/SMU/MA/SMK/ sederajat	27,50	24,16
D I/II/III	2,10	1,84
D IV/S1/S2/S3	0,90	1,92
<b>SLTP +</b>	<b>45,48</b>	<b>47,40</b>
<b>Rata-rata lama sekolah (15 Thn Keatas)</b>	7,70	7,95

Sumber : BPS Kabupaten Bintan

Masih rendahnya ijazah tertinggi yang dimiliki diatas juga terlihat dari rata-rata lama sekolah yang belum cukup tinggi, dimana pada tahun 2006 rata-rata lama sekolah di Kabupaten masih sekitar 7,95 atau setara dengan SLTP kelas satu atau dua. Bahkan penduduk 10 tahun keatas yang menuntaskan pendidikan sampai tingkat SLTP belum mencapai setengahnya.

Dengan belum tuntasnya wajib belajar 9 tahun, maka perlu adanya terobosan-terobosan baru terutama mengenai ketersediaan fasilitas pendidikan yang memadai. Informasi tentang banyaknya sarana pendidikan, tenaga pengajar, kelas, perpustakaan dan lain-lain mutlak diperlukan guna mengetahui sejauh mana ketersediaan fasilitas yang ada, walaupun informasi ini belum dapat mendeteksi kualitas daripada sarana pendidikan yang ada.

Untuk menggambarkan ketersediaan fasilitas pendidikan paling tidak ada dua indikator yang dapat digunakan, yaitu rasio murid guru dan rasio murid sekolah. Rasio murid guru, diperoleh dari perbandingan antara jumlah murid dan jumlah guru, yang dapat digunakan untuk menggambarkan beban kerja guru dalam mengajar.

Sedangkan rasio murid sekolah didapat dari perbandingan jumlah murid dengan jumlah sekolah, dimana dapat digunakan untuk memantau daya tampung sekolah.

Pada tahun ajaran 2006-2007, di Kabupaten Bintan rasio murid guru terlihat cukup ideal untuk sekolah umum, artinya beban guru tidak besar sehingga diharapkan pengawasan dan perhatian guru terhadap siswa dapat lebih fokus dan pada akhirnya mutu pengajaran di kelas akan meningkat.

Tabel 6.  
**Rasio Murid-Guru dan Murid-Sekolah di Kabupaten Bintan, TA. 2007/2008**

Jenjang Pendidikan	Rasio Murid - Guru	Rasio Murid - Sekolah
SD	14	175
MI	8	80
SMP	16	216
MTs	7	102
SMA	13	337
SMK	9	96
MA	6	97

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan, data diolah

Dari **Tabel 6** juga memperlihatkan bahwa di sekolah-sekolah agama rasio murid guru sangat kecil. Nilai rasio yang kecil ini tentunya diharapkan akan berdampak pada peningkatan mutu. Namun demikian, rasio yang kecil juga dapat menggambarkan bahwa minat siswa untuk bersekolah di sekolah tersebut juga kecil. Hal ini sejalan dengan nilai rasio murid sekolah yang tidak mencapai 100 di setiap jenjangnya.

#### **4.2.2 Bidang Kesehatan Masyarakat**

Selain pendidikan, kualitas kesehatan yang dimiliki seseorang menggambarkan kualitas manusianya. Manusia yang sehat rohani dan jasmani, dapat dikatakan bahwa kualitas gizi yang dikonsumsinya relatif baik, disamping itu agar kondisi tetap sehat perlu tubuh dijaga. Untuk menjaga kesehatan tubuh, perlu pengetahuan mengenai hal

tersebut. Jika kondisi tubuh baik dan sehat, maka dapat diharapkan angka harapan hidup sejak lahir meningkat pula.

Angka kematian bayi merupakan indikator yang secara langsung berkaitan dengan angka harapan hidup. Atau dengan kata lain indikator ini bisa memberikan gambaran mengenai derajat kesehatan penduduk. Namun demikian, angka kematian bayi belum tersedia sampai level kabupaten/kota. Hal ini dikarenakan penghitungan angka kematian bayi didasarkan pada hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia yang sampelnya kecil. Secara nasional angka kematian bayi pada tahun 2002 yaitu 35 kematian bayi per 1000 kelahiran hidup (BPS, 2005).

Tabel 7.  
**Persentase Balita Menurut Penolong Kelahiran di Kabupaten Bintan, 2007**

<b>Penolong Kelahiran</b>	<b>Kelahiran Pertama</b>	<b>Kelahiran Terakhir</b>
Dokter/Bidan/Paramedis	90,51	94,05
Dukun	8,30	5,95
Famili/Lainnya	1,19	-

Sumber : BPS Kabupaten Bintan

Indikator lain yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesehatan bayi dan balita adalah penolong pada saat kelahiran. Penolong kelahiran oleh tenaga kesehatan/paramedis yang berpengalaman tentunya dapat meminimalisir angka kematian bayi terkait dengan proses persalinan. Pada tahun 2007, sekitar 94,05 persen balita ditolong oleh tenaga kesehatan pada saat lahir.

Indikator lain yang terkait dengan kesehatan masyarakat yaitu tingkat keluhan penduduk terhadap kesehatan. Berdasarkan hasil Susenas 2007, keluhan kesehatan yang sering dialami oleh penduduk Kabupaten Bintan yaitu batuk dan pilek, yaitu sekitar 20,70 persen dan 19,92 persen. Dari penduduk yang mengalami keluhan sampai mengganggu kegiatan sehari-hari mayoritas cara penyembuhannya adalah

dengan diobati sendiri (67,91 persen), yaitu dengan menggunakan obat modern (85,11 persen) lihat **Tabel 8**.

Untuk peningkatan status dan derajat kesehatan masyarakat tentunya harus didukung dengan ketersediaan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dokter dan paramedis lainnya.

Tabel 8.  
**Persentase Penduduk Menurut Keluhan Kesehatan dan Cara Pengobatan di Kabupaten Bintan, 2006**

<b>Indikator</b>	<b>Persentase</b>
<b>Keluhan kesehatan</b>	
Batuk	20,68
Pilek	18,04
Asma/sesak napas	2,28
Diare	1,62
Sakit Kepala berulang	8,84
Sakit gigi	3,05
Lainnya *)	4,67
<b>Cara Pengobatan</b>	
Mengobati sendiri	68,34
Obat modern	81,62

Keterangan : \*) misalnya, telinga berair/congek, liver, kejang-kejang, lumpuh, pikun, kecelakaa, dll.

Sumber : BPS Kabupaten Bintan

Di wilayah Kabupaten Bintan hanya ada 2 buah rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Antam di Kijang Kecamatan Bintan Timur dan Rumah Sakit Provinsi di Busung Kecamatan Seri Kuala Lobam. Sarana puskesmas yang dimiliki sekitar 52 buah yang terdiri dari puskesmas, puskesmas pembantu dan puskesmas keliling. Adapun untuk tenaga medis, dokter 60 orang dan paramedis (perawat dan bidan) sekitar 205 orang.

Tabel 9  
**Banyaknya Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Bintan,  
 2007**

<b>Fasilitas Kesehatan</b>	<b>Jumlah</b>
<b>Sarana Kesehatan</b>	
Rumah Sakit	2
Puskesmas	10
Puskesmas pembantu	29
Puskesmas keliling	13
<b>Tenaga Kesehatan</b>	
Dokter	60
Perawat	121
Bidan	84

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan

Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk yang mencapai 122.677 jiwa pada tahun 2007, maka terlihat fasilitas kesehatan yang tersedia masih sangat kurang. Dari jumlah sarana kesehatan pada **Tabel 9** dapat disimpulkan bahwa 1 buah sarana kesehatan (RS atau puskesmas) harus melayani sekitar 2.272 penduduk. Dan 1 orang dokter harus melayani hampir 2.045 penduduk. Sedangkan 1 orang perawat dan bidan harus melayani sekitar 598 penduduk. Tentunya perbandingan ini masih sangat tidak sebanding, dengan banyaknya beban yang harus dilayani biasanya akan berdampak pada penurunan kualitas pelayanan yang diberikan.

#### **4.2.3 Bidang Kesejahteraan Masyarakat**

*Recovery* ekonomi yang dilakukan di berbagai daerah pasca krisis nasional sekitar tahun 1997-1999 telah membuahkan hasil yang cukup signifikan. Hal ini tidak terlepas dari pemberlakuan Otonomi Daerah yang memberikan kewenangan sebesar-besarnya untuk merencanakan dan menjalankan pembangunan di daerahnya masing-masing.

Secara umum banyak indikator yang dapat digunakan untuk melihat sejauh mana kondisi kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Salah satu yang sering dipakai adalah indikator pengeluaran per kapita. Untuk melihat kondisi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bintan dapat dilihat pada **Tabel 10**.

Tabel 10.  
**Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Per Bulan di Kabupaten Bintan, 2007**

<b>Pengeluaran Per Kapita Per Bulan</b>	<b>Jumlah (Rp.)</b>
<b>Total pengeluaran</b>	490.063
Makanan	235.479
Non Makanan	254.583

Sumber : BPS Kabupaten Bintan

Pada tahun 2007, pengeluaran per kapita penduduk Kabupaten Bintan adalah Rp 490.063,- per bulan. Konsumsi pengeluaran rumah tangga di Kabupaten Bintan telah mengalami pergeseran kearah positif dengan meningkatnya proporsi pengeluaran non makanan. Konsumsi non makanan menembus 51,95 persen dari total pengeluaran rumah tangga. Hal ini menandakan kesejahteraan penduduk Kabupaten Bintan telah meningkat. Dan juga mengindikasikan bahwa pemekaran wilayah dan pelaksanaan otonomi daerah telah mulai berjalan dengan baik dan mampu mendorong kesejahteraan masyarakat.

## **BAB V**

# **INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN BINTAN**

### **5.1 Perkembangan IPM Kabupaten Bintan**

Selama periode 2006-2007 pembangunan manusia di Indonesia mengalami peningkatan. Hal ini terkait erat dengan dampak dari situasi perekonomian negara yang secara menyeluruh menunjukkan perbaikan, termasuk juga perbaikan ekonomi di Provinsi Kepulauan Riau yang ditandai dengan meningkatnya perkiraan pertumbuhan ekonomi dari sekitar 7,08 persen pada tahun 2005 meningkat sekitar 7,23 persen pada 2006 kemudian meningkat lagi menjadi 7,55 persen pada tahun 2007. Meningkatnya perkiraan pertumbuhan ekonomi memiliki rangkaian dampak yang luas, selain meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita dan pendapatan per kapita penduduk, juga mendorong perbaikan di sektor sosial mencakup peningkatan kapabilitas dasar penduduk yang pada gilirannya kualitas penduduk semakin meningkat.

Dengan demikian, peningkatan pembangunan manusia Indonesia selama periode 2006-2007 telah berimbas pada peningkatan pembangunan manusia di semua provinsi termasuk Provinsi Kepulauan Riau. Pada tahun 2007, IPM Provinsi Kepulauan Riau tercatat sebesar 73,68 meningkat sekitar 0,89 persen poin dibandingkan IPM tahun 2006 yang sebesar 72,79. Peningkatan IPM selama periode 2006-2007 dapat dipandang semakin membaiknya pelayanan dasar khususnya dalam bentuk pelayanan kesehatan dan pendidikan kepada penduduk sehingga dapat meningkatkan kapabilitas penduduk di Provinsi Kepulauan Riau. Ditinjau dari posisinya relatif terhadap provinsi lain di Pulau Sumatera, Provinsi Kepulauan Riau menempati urutan ke dua setelah Provinsi Riau di urutan pertama dan menempati urutan ke enam di semua provinsi.

Peringkat pembangunan manusia Provinsi Kepulauan Riau yang relatif baik terhadap peringkat nasional, tidak terlepas dari kinerja pembangunan kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau termasuk di dalamnya kinerja Kabupaten Bintan. Kabupaten Bintan yang dahulu namanya Kabupaten Kepulauan Riau selama beberapa tahun terakhir mengalami kemajuan yang cukup pesat dalam pembangunan manusia. Pada tahun 2007 Kabupaten Bintan mempunyai urutan 134 pada IPM nasional, setahun kemudian tahun 2007 sudah berubah posisi, yakni di urutan 97. Perubahan urutan Kabupaten Bintan yang relatif cepat terhadap 457 kabupaten/kota di seluruh Indonesia tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan ada upaya konsisten yang dilakukan oleh berbagai pihak secara bersama-sama termasuk pemerintah daerah dalam meningkatkan kapabilitas dasar penduduk melalui berbagai kemudahan untuk memperoleh pelayanan dasar seperti pelayanan kesehatan dan pendidikan yang murah dan berkualitas.

Tabel 11  
**Perkembangan IPM Kabupaten Bintan, 2005-2007**

<b>Tahun</b>	<b>IPM</b>	<b>Reduction Shortfall</b>
2005	70,9	3,96
2006	71,58	2,41
2007	72,97	4,88

Sumber : BPS Kabupaten Bintan

Pada tahun 2007, IPM Kabupaten Bintan tercatat sebesar 72,97. Angka IPM ini cenderung meningkat dibandingkan angka IPM tahun 2006 yang sebesar 71,58. Dengan demikian IPM Kabupaten Bintan selama periode 2006-2007 mengalami laju pencapaian yang cukup pesat sebesar 4,88 yang berarti selama periode tersebut terjadi pengurangan jarak (*reduction shortfall*) IPM terhadap IPM ideal (100) mencapai 4,88. Menurut kategori, IPM Kabupaten Bintan masuk dalam status menengah atas. Meningkatnya angka IPM Kabupaten Bintan didorong oleh meningkatnya angka

komponen-komponen penyusun IPM. Angka harapan hidup Kabupaten Bintan pada tahun 2007 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 69,50. Ini berarti pada tahun 2007 rata-rata umur penduduk Bintan lebih lama 25 hari dibandingkan tahun 2006. Angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah juga mengalami peningkatan, angka melek huruf meningkat sebesar 1,49 persen pada tahun 2007 sedangkan rata-rata lama sekolah meningkat dari 7,70 pada tahun 2006 menjadi 7,95 pada tahun 2007. Kemampuan daya beli penduduk Bintan yang dipersentasikan melalui rata-rata pengeluaran riil pada tahun 2007 juga mengalami peningkatan sebesar Rp 10, 78 ribu yaitu dari Rp 626,22 ribu pada tahun 2006 menjadi Rp 637 ribu pada tahun 2007.

Tabel 12  
**Perkembangan Komponen IPM Kabupaten Bintan, 2005-2007**

Tahun	Angka Harapan Hidup	Angka Melek Huruf	Rata2 Lama Sekolah	Rata2 Pengeluaran Per Kapita Riil Disesuaikan (Rp.000)	IPM
2005	69,3	92,9	7,3	623,0	70,9
2006	69,50	92,91	7,70	626,22	71,58
<b>2007</b>	<b>69,57</b>	<b>94,40</b>	<b>7,95</b>	<b>637,00</b>	<b>72,97</b>

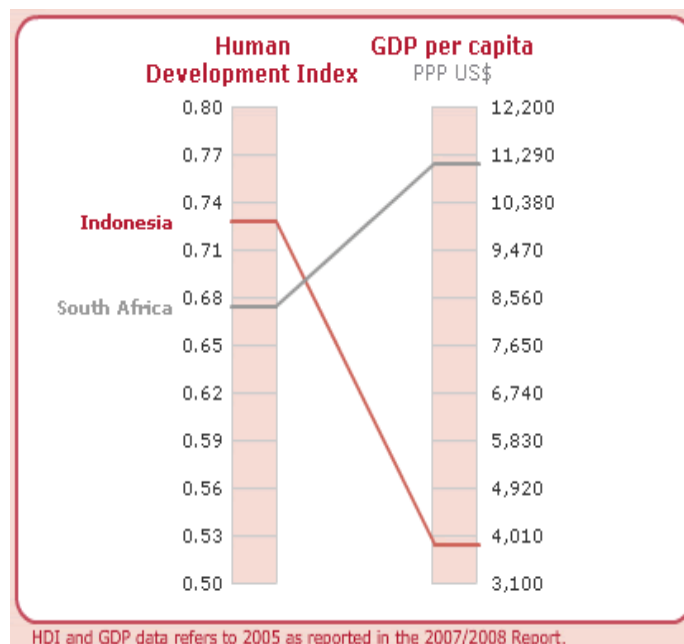
Sumber : BPS Kabupaten Bintan

## 5.2 Perkembangan IPM Antar Kabupaten/Kota

Posisi relatif Kabupaten Bintan terhadap kabupaten/kota lainnya di Provinsi Kepulauan Riau mengalami peningkatan. Pada tahun 2006 peringkat Kabupaten Bintan berada di urutan ke empat, pada tahun 2007 peringkat Kabupaten Bintan berada pada urutan ketiga setelah Kota Batam (1) dan Kota Tanjungpinang (2) menggeser Kabupaten Karimun yang pada tahun 2006 berada pada urutan ke tiga.

Jika dilihat dari beberapa indikator makro ekonomi yang dimiliki seperti nilai PDRB per kapita, pertumbuhan ekonomi, seharusnya IPM Kabupaten Bintan lebih baik dibandingkan IPM Kota Tanjungpinang. Namun, berdasarkan data empiris menunjukkan bahwa IPM Kota Tanjungpinang lebih baik dari IPM Kabupaten Bintan. Terkait dengan kasus ini, ada hal yang harus dipahami bahwa pertumbuhan ekonomi tidak selalu sejalan dengan peningkatan IPM. Kongkretnya, pertumbuhan ekonomi merupakan syarat perlu untuk pembangunan, tetapi belum cukup apabila pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak berkualitas. Artinya pertumbuhan ekonomi tidak mampu menciptakan pemerataan pendapatan kepada semua lapisan penduduk melalui penciptaan lapangan pekerjaan, tidak dibelanjakan secara memadai untuk prioritas sosial seperti untuk kesehatan dan pendidikan. Gambar berikut menjelaskan mengenai hubungan antara IPM dengan PDB per kapita. Pada gambar tersebut menunjukkan bahwa Indonesia yang mempunyai IPM sekitar 0,73 ternyata PDB per kapita hanya sekitar 4.010 US \$, sedangkan Afrika Selatan dengan PDB per kapita sekitar 11. 290 US \$, IPM hanya sekitar 0,67.

Gambar 1  
**IPM Versus PDRB Per Kapita**



Selain itu, rendahnya angka IPM Kabupaten Bintan dibanding IPM Kota Tanjungpinang juga dikarenakan komponen IPM Kabupaten Bintan seperti angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah yang jauh lebih besar dibandingkan Kota Tanjungpinang. Dimana angka melek huruf penduduk Kota Tanjungpinang sudah mencapai 97,30 persen sedangkan Bintan hanya mencapai 94,40 persen. Rata-rata lama sekolah penduduk Kota Tanjungpinang tercatat sebesar 9,20 ini berarti tingkat pendidikan penduduknya sudah setara dengan SMP Kelas 3, sedangkan Bintan baru sebesar 7,95 atau setara dengan kelas 2 SMP. Untuk komponen lainnya yaitu angka harapan hidup dan rata-rata pengeluaran perkapita riil Kabupaten Bintan mempunyai nilai yang lebih besar, tetapi selisih nilai antara Kabupaten Bintan dan Kota Tanjungpinang tidak begitu besar sehingga tidak bisa membuat IPM Kabupaten Bintan menjadi lebih besar dibandingkan Kota Tanjungpinang.

Perbandingan komponen penyusun IPM Kabupaten Bintan dengan komponen penyusun IPM kabupaten/kota lain dan provinsi dapat dilihat pada **Tabel 13**, terlihat bahwa nilai komponen penyusun IPM Kabupaten Bintan walaupun masih di bawah Kota Batam dan Tanjungpinang, tetapi masih lebih unggul dibandingkan Kabupaten Karimun, Natuna dan Lingga. Hal ini yang membuat IPM Kabupaten Bintan lebih baik dibanding IPM Kabupaten Karimun, Natuna dan Lingga. Jika dibandingkan dengan komponen penyusun IPM provinsi, terlihat bahwa ada tiga komponen IPM Kabupaten Bintan masih di bawah provinsi, yaitu angka harapan hidup, angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah sehingga apabila dihitung indeksnya akan membuat IPM Provinsi Kepulauan Riau lebih besar dibandingkan IPM Kabupaten Bintan.

Tabel 13  
**IPM Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau, 2005-2006**

Kabupaten/Kota	Angka Harapan Hidup	Angka Melek Huruf	Rata2 Lama Sekolah	Rata2 Pengeluaran Per Kapita Riil Disesuaikan (Rp.000)	IPM
<b>Tahun 2005</b>					
Karimun	69,5	95,0	7,8	620,8	71,7
Bintan	69,3	92,9	7,3	623,0	70,9
Natuna	67,5	95,3	6,7	602,0	68,4
Lingga	69,2	90,9	7,1	611,6	69,4
Batam	70,5	98,8	10,7	638,0	76,5
Tanjungpinang	69,1	97,3	9,2	616,5	72,7
Prov. Kepulauan Riau	69,5	96,0	8,1	621,9	72,2
<b>Tahun 2006</b>					
Karimun	69,70	95,00	7,80	623,33	72,00
Bintan	69,50	92,91	7,70	626,22	71,58
Natuna	67,90	95,75	6,90	604,09	69,02
Lingga	69,60	90,90	7,20	613,71	69,85
Batam	70,60	98,84	10,70	638,49	76,68
Tanjungpinang	69,40	97,30	9,20	616,76	72,88
Prov. Kepulauan Riau	69,60	96,00	8,40	625,54	72,79

Sumber : Badan Pusat Statistik

## **BAB VI**

### **INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA ANTAR KECAMATAN DI KABUPATEN BINTAN**

#### **6.1 IPM Kecamatan**

Pencapaian pembangunan manusia Kabupaten Bintan baik ditinjau dari besaran angka IPM maupun urutannya sebenarnya tidak terlepas dari pencapaian pembangunan manusia di tingkat kecamatan. Jadi, pencapaian pembangunan manusia Bintan merupakan agregasi pencapaian pembangunan di setiap kecamatan. **“Publikasi Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bintan Tahun 2007”** masih menggunakan enam kecamatan di Kabupaten Bintan, yakni Teluk Bintan (40), Bintan Utara (50), Teluk Sebong (51), Bintan Timur (60), Gunung Kijang (61), dan Tambelan (70). Secara umum pencapaian pembangunan manusia di tingkat kecamatan di Kabupaten Bintan yang tercermin dari angka IPM sudah di atas angka 68. Artinya, berdasarkan kategori status pembangunan yang direkomendasikan UNDP, pencapaian IPM kecamatan sudah termasuk dalam kategori status pembangunan menengah ke atas (66-79).

Pembangunan manusia di semua kecamatan di Kabupaten Bintan secara umum mengalami kemajuan. Namun demikian, kemajuan pembangunan manusia antar kecamatan satu dengan kecamatan lainnya sangat bervariasi. Ada kecamatan yang mengalami peningkatan IPM secara cepat, dan sebaliknya ada pula kecamatan dengan peningkatan IPM relatif lambat. Namun demikian, dari enam kecamatan di Kabupaten Bintan tidak satupun kecamatan termasuk dalam kategori tinggi, jika diukur menurut skala internasional<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> *Kategori tinggi (IPM ≥ 80), kategori menengah atas (66 ≤ IPM < 80); kategori menengah bawah (50 ≤ IPM < 66); dan kategori rendah (IPM < 50)*

Berdasarkan skala internasional semua kecamatan di Kabupaten Bintan termasuk dalam kategori IPM menengah atas. Artinya bahwa status pembangunan kualitas manusia yang dicapai semua kecamatan di Kabupaten Bintan masih tergolong dalam kategori menengah atas. Dibandingkan dengan status pembangunan kualitas manusia pada tahun 2006 ada perubahan capaian. Terdapat lima kecamatan tidak mengalami perubahan status pembangunan, kecuali Kecamatan Tambelan. Pada tahun 2006 Kecamatan Tambelan status pembangunan kualitas manusia yang dicapai termasuk kategori menengah bawah, tetapi pada tahun 2007 sudah berubah menjadi status pembangunan menengah atas.

Tabel 14  
**IPM dan Status Pembangunan Kecamatan, 2006-2007**

Kecamatan	IPM		Status Pembangunan	
	2006	2007	2006	2007
1	2	3	4	5
Teluk Bintan	66.8	69.1	MA	MA
Bintan utara	72.2	74.7	MA	MA
Teluk Sebong	70.3	72.7	MA	MA
Bintan Timur	72.4	73.7	MA	MA
Gunung Kijang	68.6	72.0	MA	MA
Tambelan	65.7	68.0	MB	MA
Bintan	71.6	73.0	MA	MA

Keterangan: MA, Menengah Atas  
 MB, Menengah Bawah

Lebih jauh bila ditinjau dari perkembangannya, tiga kecamatan seperti Teluk Bintan, Gunung Kijang dan Bintan Utara saling kejar dalam pencapaian IPM. Diantara tiga kecamatan yang paling cepat pencapaian IPM selama 2006-2007 adalah kecamatan Gunung Kijang, yang berarti selama satu tahun terakhir terdapat peningkatan pembangunan kapabilitas dasar penduduk secara cepat yang terindikasi dari peningkatan ke empat indikator, yakni angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah dan daya beli sebagai pembentuk IPM.

Pada tahun 2006 Kecamatan Gunung Kijang menempati urutan ke empat dari enam kecamatan di Kabupaten Bintan setelah Kecamatan Teluk Sebong, kemudian pada tahun 2007 IPM Kecamatan Gunung Kijang meningkat tajam, meski dari posisi tidak berubah masih menempati urutan ke empat diatas Kecamatan Teluk Bintan dan Kecamatan Tambelan yang masing-masing menempati urutan ke lima dan ke enam. Demikian halnya dengan tiga kecamatan lainnya Bintan Utara, Bintan Timur dan Teluk Sebong urutannya tidak berubah selama 2006-2007. Lebih jauh, untuk mengetahui seberapa cepat pencapaian IPM setiap kecamatan dapat dilihat dari *reduksi shortfall* masing-masing kecamatan.

Tabel 15  
**IPM dan Urutannya Menurut Kecamatan,  
 2006 - 2007**

Kecamatan	IPM		Urutan	
	2006	2007	2006	2007
1	2	3	4	5
Teluk Bintan	66.8	69.1	5	5
Bintan Utara	72.2	74.7	1	1
Teluk Sebong	70.3	72.7	3	3
Bintan Timur	72.4	73.7	2	2
Gunung Kijang	68.6	72.0	4	4
Tambelan	65.7	68.0	6	6
Bintan	71.6	73.0		

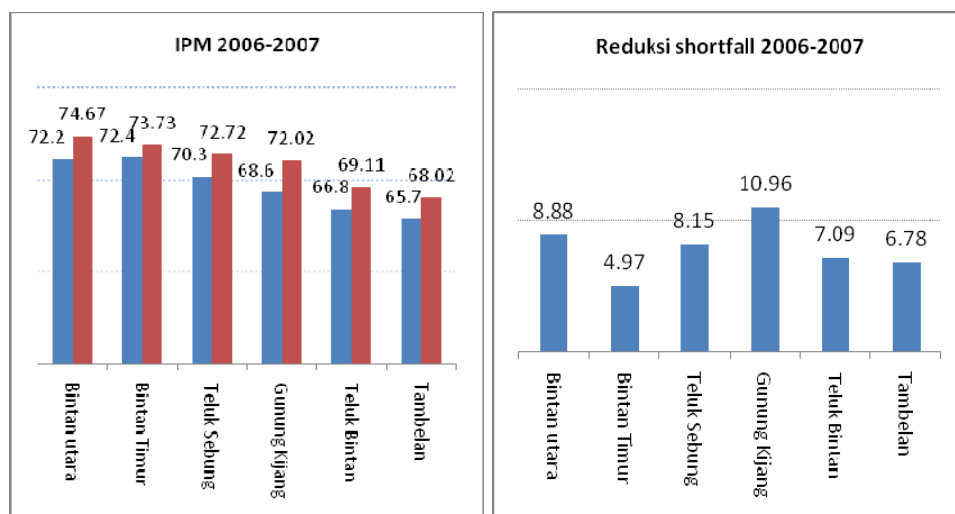
Sumber: BPS Kabupaten Bintan

Seperti yang diketahui, Kecamatan Gunung Kijang mengalami peningkatan yang cukup pesat dalam pencapaian IPM. Hal ini dapat dilihat dari nilai *reduksi shortfall* yang mencapai 10,96 persen. Ditinjau dari besarnya angka *reduksi shortfall*, angka yang dicapai Kecamatan Gunung Kijang tergolong pencapaian kategori tinggi. Memang sulit diterima peningkatan IPM suatu wilayah selama satu tahun mencapai lebih dari 3 poin, bahkan hingga mencapai sekitar puluhan poin, karena faktor sosial

dalam hal ini angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf peningkatannya sangat lambat.

Perlu diketahui bahwa ketiga indikator sosial tersebut sangat tidak mungkin dalam jangka waktu satu tahun meningkat sebesar 1 poin. Barangkali alasan yang dapat diterima dari peningkatan IPM yang relatif cepat karena faktor daya beli masyarakat dimana besaran peningkatan indikator daya beli tidak terbatas (*unlimited*). Faktor daya beli secara teori sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi, meski demikian pertanyaannya seberapa besar komitmen pemerintah daerah mampu menterjemahkan pertumbuhan ekonomi menjadi berkualitas. Artinya apakah pertumbuhan ekonomi sudah dinikmati oleh semua lapisan penduduk? Lalu, apakah pemerintah daerah sudah mengalokasikan belanja publik untuk pengeluaran sosial (kesehatan dan pendidikan) secara memadai? Dengan demikian, tingginya daya beli di Provinsi Kepulauan Riau khususnya di Kabupaten Bintan disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi selama beberapa tahun terakhir meningkat pesat sehingga berdampak pada peningkatan pendapatan per kapita. Sementara itu, kecamatan yang lain seperti Bintan Timur dan Tambelan kecepatan pencapaian IPM yang tercermin dari nilai *reduksi shortfall* berkisar 4-7 persen.

Gambar 2  
**Perkembangan IPM dan Reduksi *Shortfall* Menurut Kecamatan di Kabupaten Bintan, 2006-2007**



## **6.2 Perkembangan Komponen IPM Kecamatan**

Peningkatan kapabilitas dasar penduduk merupakan hal yang terpenting dalam meningkatkan laju percepatan IPM sebagai manifestasi dari pembangunan manusia. Perubahan yang terjadi baik peningkatan maupun penurunan angka IPM tentu disebabkan oleh perubahan dari komponen IPM. Namun demikian, perubahan komponen IPM juga tidak dengan sendirinya melainkan sangat erat kaitannya dengan berbagai faktor yang saling bertalian. Angka harapan hidup misalnya, indikator ini sangat tergantung dari pola kematian bayi. Semakin tinggi angka kematian bayi suatu wilayah, maka dapat dipastikan umur harapan hidup penduduk semakin rendah. Agar dapat dicapai nilai (*rate*) yang lebih tinggi dari komponen pembentuk IPM, maka perlu upaya serius dari berbagai pihak meningkatkan kapabilitas dasar penduduk melalui peningkatan kualitas kesehatan penduduk, pengetahuan dan ketrampilan dalam bentuk kemudahan bagi penduduk untuk memperoleh pelayanan dasar terkait dengan kesehatan, pendidikan dan pekerjaan.

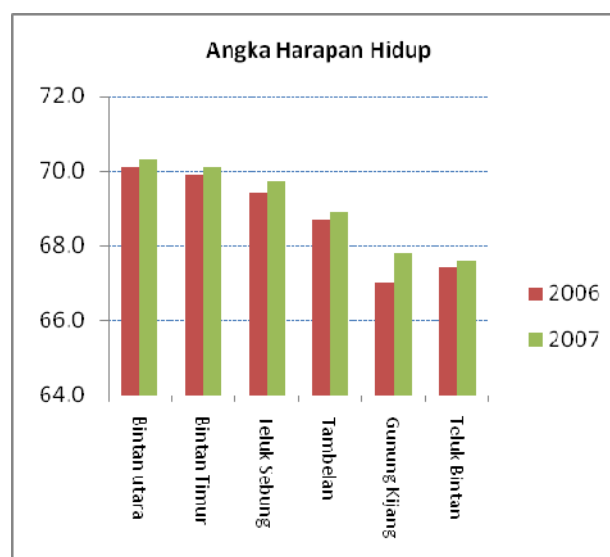
### **6.2.1 Angka Harapan Hidup**

Angka Harapan Hidup merupakan perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup (secara rata-rata). Indikator angka harapan hidup sering digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk khususnya di bidang kesehatan. Gambar 4 memperlihatkan perkembangan angka harapan hidup selama kurun waktu 3 tahun terakhir. Pada gambar terlihat, secara umum perkembangan angka harapan hidup selama 2005-2007 menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2005 angka harapan hidup penduduk Kabupaten Bintan tercatat sebesar 69,3 tahun, meningkat menjadi 69,5 tahun pada tahun 2006, dan pada tahun 2007 mencapai 69,6 tahun. Peningkatan angka harapan hidup di Kabupaten Bintan selama kurun waktu 2005-2007 mengindikasikan telah

terjadi perbaikan di bidang kesehatan sehingga pola kematian penduduk termasuk didalamnya kematian bayi mengalami penurunan. Demikian halnya dengan angka harapan hidup di setiap kecamatan selama 2005-2006 juga mengalami peningkatan.

Lebih jauh, jika perkembangan angka harapan hidup ditinjau menurut kecamatan, maka Bintang Utara merupakan kecamatan yang tingkat pencapaiannya relatif paling cepat dibandingkan kecamatan lainnya. Pada tahun 2007 angka harapan hidup Kecamatan Bintang Utara diperkirakan telah mencapai sekitar 70,3 tahun meningkat sebesar 0,2 poin tahun dibandingkan dengan tahun 2006 yang mencapai 70,1 tahun. Berikutnya, pencapaian angka harapan hidup tertinggi ke dua adalah Kecamatan Bintang Timur yang diperkirakan mencapai 70,1 tahun pada tahun 2007. Tingginya angka harapan hidup yang dicapai kedua kecamatan tersebut, menyebabkan angka harapan hidup Kecamatan Bintang Utara dan Bintang Timur melampaui angka harapan hidup Kabupaten Bintan. Sedang pencapaian angka harapan hidup terendah pada tahun 2007 adalah Kecamatan Teluk Bintan yang diperkirakan mencapai 67,6 tahun.

Gambar 3  
**Perkembangan Harapan Hidup Per  
Kecamatan, 2006-2007**



Sumber: BPS Kabupaten Bintan

### **6.2.2 Angka Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah**

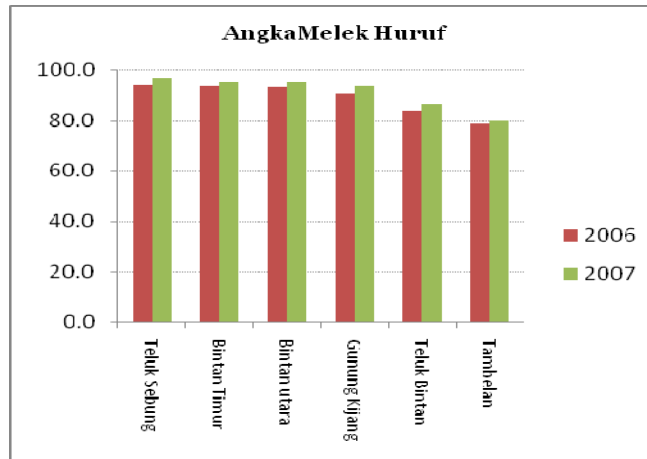
Indikator pendidikan yang merepresentasikan dimensi pengetahuan dalam pembentukan IPM adalah angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Dalam konteks yang lebih luas indikator melek huruf dan rata-rata lama sekolah mempunyai peranan yang sangat strategis mengingat kedua indikator tersebut dapat digunakan untuk menilai keberhasilan suatu negara dalam bidang pendidikan. Untuk itu, peranan negara sangat dibutuhkan dalam rangka meningkatkan kapabilitas dasar penduduk melalui berbagai kebijakan untuk menurunkan angka melek huruf dan meningkatkan lama sekolah, sehingga di masa datang sumber daya manusia sebagai individu maupun secara berkelompok semakin meningkat kualitasnya.

Angka Melek Huruf di Kabupaten Bintan selama tiga tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang meningkat. Pada tahun 2007 angka melek huruf Kabupaten Bintan tercatat sebesar 94,4 persen. Angka ini meningkat dari tahun sebelumnya yakni sebesar 92,91 persen pada 2006. Dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Kepulauan Riau, posisi Kabupaten Bintan menempati urutan lima besar setelah Kota Batam, Tanjung Pinang, Natuna dan Karimun dalam pencapaian angka melek huruf. Meski demikian, angka melek huruf yang dicapai Kabupaten Bintan masih dapat ditingkatkan mengingat pencapaiannya masih di sekitar 94,4 persen sementara kabupaten/kota yang lain sudah diatas 95 persen, kecuali Kabupaten Lingga masih di sekitar 90 persen.

Lebih jauh, perkembangan angka melek huruf di tingkat kecamatan dapat dilihat pada Gambar 5. Pada tahun 2007 pencapaian angka melek huruf hampir di semua kecamatan Kabupaten Bintan sudah diatas 90 persen, kecuali untuk Kecamatan Teluk Bintan dan Tambelan yang masing-masing capaiannya di sekitar 86,6 persen dan 79,8 persen. Meski demikian, jika dibandingkan dengan tahun 2005 dan tahun 2006 capaian angka melek huruf untuk semua kecamatan mengalami peningkatan. Teluk Sebong merupakan kecamatan dengan pencapaian angka melek huruf tertinggi sekitar

96,9 persen, berikutnya Kecamatan Bintang Timur dan Bintang Utara masing-masing capaiannya sebesar 95,1 persen. Sedangkan Kecamatan Tambelan adalah yang terendah capaiannya, yaitu sekitar 79,8 persen.

Gambar 4  
**Perkembangan Angka Melek Huruf Per kecamatan, 2006-2007**



Sumber: Diolah khusus dari tabel lampiran

Indikator pendidikan lainnya yang merupakan komponen IPM adalah rata-rata lama sekolah. Indikator ini menggambarkan rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani.

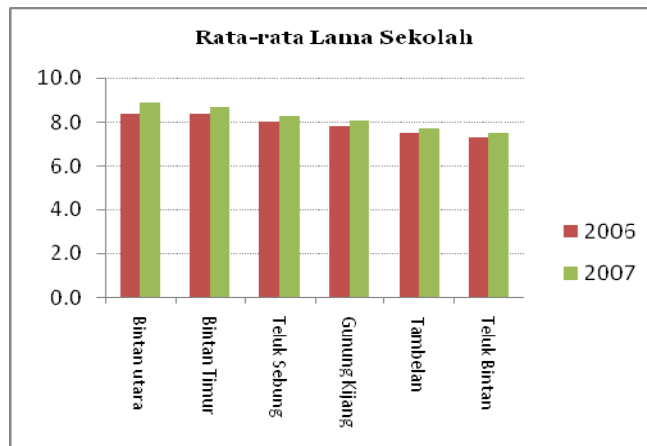
Selama tiga tahun terakhir, rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Bintang mengalami peningkatan yang cukup berarti dari 7,3 tahun pada tahun 2005 menjadi sekitar 8 tahun pada tahun 2007 atau naik sebesar 0,7 tahun selama 2005-2007. Berarti tingkat pendidikan penduduk Bintang setara dengan tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) kelas dua pada tahun 2007. Dari kenaikan sekitar 0,7 tahun dalam waktu dua tahun menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah relatif lambat peningkatannya. Berarti untuk menaikkan rata-rata lama sekolah satu tahun membutuhkan waktu sekitar tiga tahun. Hal ini menunjukkan bahwa tidak mudah bagi pemerintah daerah meningkatkan rata-rata lama sekolah penduduk dalam waktu

singkat meski biaya yang dikeluarkan untuk investasi pendidikan cukup besar. Jadi, untuk melihat hasil nyata dari biaya yang telah dikeluarkan untuk investasi pendidikan dibutuhkan waktu.

Perkembangan tingkat pendidikan khususnya dilihat dari rata-rata lama sekolah di tingkat kecamatan Kabupaten Bintan secara umum menunjukkan peningkatan. Meski demikian, tingkat pendidikan penduduk Kecamatan Bintan Utara pada tahun 2007 masih menempati urutan tertinggi, yaitu dengan rata-rata lama sekolah sekitar 8,89 tahun atau hampir setara dengan SMP kelas tiga. Berikutnya Kecamatan Bintan Timur urutan kedua dengan rata-rata lama sekolah 8,26 tahun atau setara dengan kelas dua SMP. Sedangkan urutan terendah adalah tingkat pendidikan penduduk di Kecamatan Tambelan sekitar 7,74 tahun atau setara dengan SMP kelas satu.

Jika dibandingkan dengan tahun 2006, urutan posisi pencapaian rata-rata lama sekolah penduduk per kecamatan pada tahun 2007 tidak mengalami perubahan. Namun demikian, dari tingkat kecepatan peningkatan rata-rata lama sekolah yang dicapai, Kecamatan Bintan Utara merupakan yang paling cepat dibandingkan kecamatan lainnya yaitu sekitar 0,49 poin tahun. Sedangkan kecamatan lainnya kecepatan peningkatannya sekitar 0,20 an poin tahun.

Gambar 5  
**Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah Per Kecamatan, 2006-2007**



Sumber: BPS Kabupaten Bintan

### **6.2.3 Daya Beli**

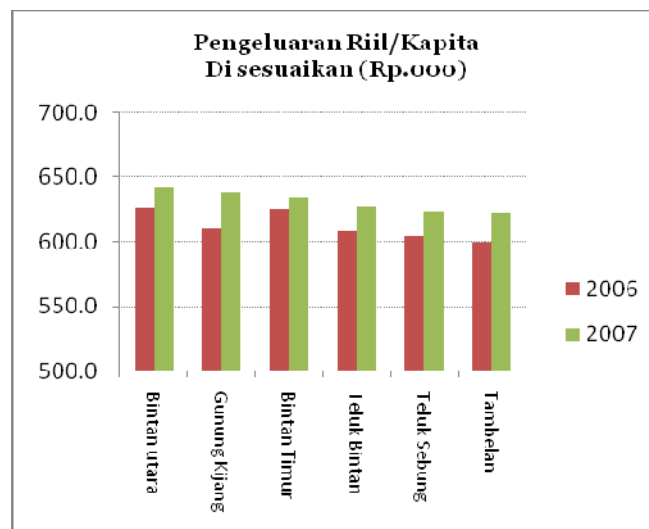
Daya beli merupakan kemampuan masyarakat dalam membelanjakan uangnya untuk barang dan jasa. Kemampuan ini sangat dipengaruhi oleh harga-harga riil antar wilayah, karena nilai tukar yang digunakan dapat menurunkan atau menaikkan nilai daya beli. Dengan demikian kemampuan daya beli masyarakat antar satu wilayah dengan wilayah lain berbeda. Perbedaan kemampuan daya beli masyarakat antar wilayah masih belum terbanding, untuk itu perlu dibuat standarisasi. Misal, satu rupiah di suatu wilayah memiliki daya beli yang sama dengan satu rupiah di Jakarta. Dengan standarisasi ini perbedaan kemampuan daya beli masyarakat antar wilayah dapat dibandingkan.

Kemampuan daya beli penduduk Kabupaten Bintan terus meningkat. Bahkan tahun 2007, daya beli penduduk Kepulauan Bintan menempati urutan kedua setelah Kota Batam. Pada tahun 2006 kemampuan daya beli penduduk yang direpresentasikan pengeluaran Riil per kapita per tahun mencapai sekitar 626 ribu, kemudian meningkat menjadi sekitar 637 ribu pada tahun 2007. Walaupun secara nominal daya beli penduduk Kabupaten Bintan relatif kecil, namun terdapat indikasi tumbuhnya sektor-sektor ekonomi yang berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi sehingga pada gilirannya penduduk memperoleh manfaat ekonomi berupa pendapatan baik sebagai buruh atau pengusaha.

Sebagaimana yang ditunjukkan Gambar 7, secara umum kemampuan daya beli penduduk di semua kecamatan meningkat selama 2006-2007. Tentu saja, kemampuan daya beli penduduk Kecamatan Bintan Utara menempati urutan pertama, yakni sebesar 642,9 ribu. Urutan berikutnya kemampuan daya beli penduduk kecamatan Gunung Kijang dan Bintan Timur masing-masing sebesar 638,3 ribu dan 634,2 ribu. Sedangkan kemampuan daya beli penduduk Kecamatan Tambelan merupakan yang terendah, yakni sekitar 621,8 ribu dari enam kecamatan di Kabupaten Bintan.

Ditinjau dari tingkat kecepatan peningkatan daya beli penduduk, tampaknya kecamatan Gunung Kijang menempati urutan pertama, yakni sebesar 28,5 ribu. Kecamatan Bintang Utara, meski dari besaran nominal tergolong paling tinggi, namun dari tingkat kecepatan peningkatan kemampuan daya beli penduduk menempati urutan kelima setelah kecamatan Teluk Sebong. Sementara itu, Kecamatan Tambelan yang mempunyai kemampuan daya beli paling rendah menempati urutan kedua setelah kecamatan Gunung Kijang.

Gambar 6  
**Perkembangan Daya Beli Kecamatan, 2006-2007**



Sumber : BPS Kabupaten Bintang

## **BAB VII PENUTUP**

Berdasarkan uraian analisis dari Bab IV diperoleh beberapa kesimpulan penting dari analisis pencapaian pembangunan manusia; yaitu

1. Kinerja pembangunan manusia di Kabupaten Bintan semakin menunjukkan peningkatan. Hal ini tercermin dari nilai IPM Kabupaten Bintan pada tahun 2006 mencapai 71,6 menjadi 73,0 tahun 2007.
2. Membaiknya kinerja pembangunan manusia di kabupaten berdampak pada kinerja pembangunan di kecamatan. IPM kecamatan di seluruh Kabupaten Bintan meningkat secara cepat, bahkan kecamatan Gunung Kijang peningkatannya mencapai hampir 11 persen.
3. Angka melek huruf kecamatan Tambelan masih rendah dikisaran 70-an persen baik tahun 2006 maupun tahun 2007. Sementara itu angka melek huruf di lima kecamatan lainnya sudah diatas 90-an persen yang berarti di kecamatan Tambelan masih banyak penduduk dewasa usia 15 tahun ke atas yang buta huruf.

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang disampaikan adalah secara umum IPM per kecamatan menunjukkan peningkatan, meski lambat. Namun demikian, upaya untuk mempercepat laju pencapaian IPM perlu upaya lebih serius terutama untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Komponen daya beli adalah satu-satunya yang dapat dipercepat peningkatannya dan tidak terbatas besaran nominalnya. Sedangkan untuk komponen e0, AMH, MYS relatif lambat peningkatannya perlu waktu meski biaya yang dikeluarkan untuk investasi relatif besar.

Hal lain yang perlu disarankan adalah mengenai penambahan sampel. Untuk memperoleh hasil IPM yang menggambarkan keadaan sebenarnya sampai level

kecamatan maka perlu penambahan sampel mengingat terdapat variabel input (anak lahir hidup dan anak masih hidup) yang digunakan untuk estimasi umur harapan hidup merupakan kasus jarang (*rare cases*).

## DAFTAR PUSTAKA

- Human Development Report, 1993. New York. USA
- Human Development Report, 1996. New York. USA
- Human Development Report, 1997. New York. USA
- Human Development Report, 2000. New York. USA
- Human Development Index , 2005. New York. USA
- H. Preston, Samuel, et.all, 2004, *Demography: Measuring and Modelling Population Processes*, Blackwell, USA.
- UNDP, BPS dan Bappenas 2001, *Laporan Pembangunan Manusia 2001: Demokrasi dan pembangunan manusia di Indonesia*, BPS–Indonesia.
- Hinde, Andrew, 1998. *Demographic Method*, Arnold, London.
- Siegel, Jacob, 2002, *Applied Demographic*, Academic Press, USA.

